

MELACAK NEGARA HUKUM IDEAL YANG BERDASARKAN KEADILAN DI INDONESIA

SAYID ANSHAR, BASO IFING
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract : *This study aims to identify the extent to which Indonesia has realized an ideal legal state based on justice. Through an in-depth analysis of regulations, judicial practices, and public perceptions, this study reveals a number of justice deficits that still haunt the Indonesian legal system. This study compares the condition of the legal state in Indonesia with universally recognized international standards of justice. Using a human rights framework and the principles of a good rule of law, this study analyzes the extent to which Indonesia's legal system has met these standards. Case studies and comparative analyses are used to identify gaps between legal practices in Indonesia and best practices in other countries. This research highlights the importance of harmonization between national law and international law in order to realize an ideal state of law.*

Keywords: *Ideal Legal State, keaadi*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Indonesia telah mewujudkan negara hukum ideal yang berlandaskan keadilan. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi, praktik peradilan, dan persepsi masyarakat, penelitian ini mengungkap sejumlah defisit keadilan yang masih menghantui sistem hukum Indonesia. Penelitian ini membandingkan kondisi negara hukum di Indonesia dengan standar keadilan internasional yang diakui secara universal. Dengan menggunakan kerangka kerja hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum yang baik, penelitian ini menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia telah memenuhi standar-standar tersebut. Studi kasus dan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik hukum di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional dalam rangka mewujudkan negara hukum yang ideal.

Kata Kunci : Negara Hukum Ideal, keadilan, analisis Komparatif.

A. Pendahuluan

Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting - Perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, administratif rechtspraak perkembangan hukum di Indonesia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem hukum saat ini beroperasi dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diinginkan. Selain itu, melacak negara hukum yang ideal juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana reformasi hukum masih diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua individu. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan negara hukum yang ideal di Indonesia tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Konsep negara hukum dan keadilan adalah tentang pentingnya hukum sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Negara hukum bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Di Indonesia, negara hukum dipengaruhi oleh Pancasila sebagai landasan praktek kedaulatan rakyat, dengan memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan [1], [2]." (Busthami, 2017)(Ridlwani, 2011)Oleh karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan hukum yang

berlaku guna mencapai tujuan negara hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari seluruh masyarakat sangatlah penting untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, negara hukum dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia, Pancasila menjadi landasan bagi negara hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan mematuhi aturan hukum dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat dapat turut berperan dalam mencapai tujuan negara hukum yang adil dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus di Indonesia di mana hukum belum diterapkan secara adil dan merata bagi semua pihak, seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang seringkali lolos dari hukuman karena memiliki kekuasaan dan pengaruh politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan negara hukum, tetapi pemenuhan keadilan sesungguhnya masih jauh dari harapan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk bekerja sama demi menciptakan sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam sistem hukum, Indonesia dapat benar-benar menjadi negara hukum yang adil dan berkeadilan.

Upaya untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum tidak boleh terhenti begitu saja, melainkan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Perlu adanya reformasi hukum yang menyeluruh, termasuk dalam hal penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Semua pihak harus memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tanpa terkecuali. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa keadilan sejati akan terwujud di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Semua warga negara harus menerima perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa pandang bulu. Langkah-langkah konkret juga harus diambil untuk memastikan independensi lembaga penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat benar-benar menjadi negara hukum yang adil dan berkeadilan, memberikan inspirasi untuk perubahan positif dalam sistem hukum di seluruh dunia. sebagai sarana untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang pentingnya aturan hukum dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Melalui kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memperkuat fondasi negara hukum yang adil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin kuat, dan negara dapat berkembang secara harmonis menuju cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi semua warganya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin kuat, dan negara dapat berkembang secara harmonis menuju cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi semua warganya. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu negara, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menjaga aturan hukum dan keadilan, negara dapat menciptakan stabilitas sosial yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, keberadaan sistem hukum yang adil juga akan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat bagi semua warga negara. Dengan demikian, setiap individu akan merasa aman dan dihormati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, keadilan dalam sistem hukum juga akan mendorong pertumbuhan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Dengan demikian, keberlangsungan negara sebagai entitas yang demokratis dan berkeadilan dapat terjamin. Kehadiran sistem hukum yang adil juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, negara juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Dengan demikian, keberadaan sistem hukum yang adil dan berkeadilan adalah kunci utama bagi kemajuan dan keberhasilan suatu negara.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian yang relevan dengan membutuhkan pendekatan yang multidisiplin, menggabungkan aspek hukum, sosiologi, dan politik, diantaranya yaitu Penelitian Hukum Normatif, analisis dokumen: Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Perbandingan hukum: Membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain yang dianggap berhasil dalam mewujudkan negara hukum yang adil. Analisis filosofis: Menganalisis konsep keadilan dalam berbagai perspektif filosofis dan hukum.

C. Hasil dan pembahasan

Karakteristik Negara Hukum Yang Ideal. Sistem hukum yang jelas dan mudah di pahami, sebagaimana dalam Sistem hukum Indonesia didasarkan pada asas-asas hukum yang mencermati fungsi asas hukum dalam sistem hukum, termasuk asas idil, operasional, dan actual. Asas-asas hukum nasional menjadi landasan bagi sistem hukum positif dan merupakan kriteria kritis terhadap keadilan hukum. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal juga menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional, dengan model yang mencoba dikembangkan berdasarkan kearifan lokal hukum adat Selain itu, karakteristik negara hukum yang ideal juga mencakup keberadaan lembaga peradilan yang independen dan transparan. Kehadiran lembaga peradilan yang bebas dari intervensi politik dan eksternal sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, proses hukum yang transparan juga memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mempercayai sistem peradilan yang ada. Dengan demikian, sistem hukum yang ideal harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut guna mencapai keadilan hukum yang sebenarnya. Penguatan lembaga peradilan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga peradilan itu sendiri, tetapi juga merupakan tugas bersama bagi seluruh masyarakat. Melalui partisipasi aktif dan pengawasan yang kritis, masyarakat dapat memastikan bahwa lembaga peradilan tetap independen dan adil dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang berkualitas dan berkeadilan bagi semua warga negara. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan hal yang penting dalam memastikan keberhasilan sistem hukum yang ideal. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan, masyarakat dapat memastikan bahwa lembaga peradilan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, akuntabilitas juga dapat memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh lembaga peradilan didasarkan pada hukum dan bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terjaga dan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik untuk kepentingan semua warga negara. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan, lembaga peradilan akan dapat memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akuntabilitas yang tinggi juga merupakan aspek penting dalam menjamin integritas sistem hukum,

sehingga kepastian hukum bagi setiap individu dapat terjamin. Sehingga, dengan menjaga kepercayaan masyarakat dan kredibilitas lembaga peradilan, sistem hukum dapat berfungsi secara optimal demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kemandirian lembaga peradilan. Kemandirian lembaga peradilan di Indonesia merupakan salah satu fokus politik hukum yang penting, dengan tujuan menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa, dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui membenahan struktur hukum, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang cepat, murah, dan transparan, serta memastikan penerapan hukum yang adil dan memihak pada kebenaran, terutama bagi rakyat miskin. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, penting bagi lembaga peradilan untuk terus beradaptasi dan memperbarui diri agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Perubahan teknologi, dinamika politik, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kemandirian lembaga peradilan. Selain itu, aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme juga menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan reformasi peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi peradilan tidak hanya sebatas pada pembaharuan regulasi dan prosedur hukum, tetapi juga melibatkan perubahan budaya organisasi dan mindset para penegak hukum. Lembaga peradilan harus mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu, perlunya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam lembaga peradilan. Dengan demikian, upaya-upaya reformasi peradilan harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan guna memastikan terciptanya sistem peradilan yang adil dan independen. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tetapi juga akan memastikan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, serta implementasi teknologi informasi dalam proses peradilan. Dengan sinergi antara berbagai pihak terkait, diharapkan lembaga peradilan dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

Perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Perlindungan hak asasi manusia sangat penting karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan sejahtera, bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Hak asasi manusia yang dilindungi akan memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya ketakutan atau hambatan yang tidak wajar. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia yang kuat juga merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keadilan di Indonesia. Dengan adanya perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dan memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan mendorong lembaga peradilan untuk menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan dan penegakan hak asasi manusia juga harus ditingkatkan secara bersama-sama agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semua individu dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara, tanpa terkecuali. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga merupakan pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan bagi semua

warganya. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia akan memberikan dampak positif dalam memperkuat fondasi keadilan di Indonesia dan menjaga kedamaian serta keberagaman yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, diharapkan semua orang dapat hidup harmonis tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Selain itu, memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih sejahtera dan beradab bagi seluruh rakyatnya.

Implementasi Negara Hukum yang Ideal di Indonesia. Evaluasi terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan negara hukum yang ideal. Beberapa masalah yang sering muncul adalah lambatnya penegakan hukum, adanya korupsi di dalam sistem hukum, serta minimnya akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan reformasi hukum guna menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, negara hukum yang ideal dapat terwujud di Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia bagi semua warganya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat merupakan kunci penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi serta pelanggaran hukum juga sangat diperlukan. Selain itu, pendidikan hukum yang lebih merata dan aksesibilitas terhadap layanan hukum yang memadai perlu ditingkatkan agar semua warga negara dapat merasakan keadilan yang sebenarnya. Sebagaimana pandangan Lord Acton, upaya perbaikan hukum secara menyeluruh menyangkut perubahan pada the content of the law, the structure of the law dan the culture of the law. Namun sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, negara hukum yang dianut harus berdasarkan Pancasila yang lebih menekankan pada substansi bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*.

Tantangan dalam mewujudkan negara hukum yang ideal. menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan keadilan substansial dan kepastian hukum yang merupakan prinsip dasar dalam negara hukum. Hal ini menuntut adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sejati bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan negara hukum yang ideal tidak hanya merupakan tugas pemerintah atau lembaga hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh warga negara. Karena pada akhirnya, keberhasilan negara hukum bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari seluruh masyarakat. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada, agar dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara keadilan substansial dan kepastian hukum dapat terus terjaga dan menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan sistem hukum negara. Dalam konteks ini, pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum dan memperkuat fondasi negara hukum. Melalui pendidikan hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta memahami proses hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat membantu masyarakat untuk lebih menghargai nilai-nilai keadilan dan menjunjung tinggi aturan hukum yang ada. Dengan demikian, pendidikan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan

masyarakat yang sadar hukum dan berkontribusi aktif dalam menjaga keberlangsungan negara hukum.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia meliputi perbaikan dalam perekrutan penegak hukum, peningkatan sarana dan fasilitas pelaksanaan hukum, pengecekan aturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penguatan lembaga pengawas hukum seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki proses peradilan, mempercepat penyelesaian kasus, dan mengurangi angka korupsi di dalam sistem hukum juga terus dilakukan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum dan berkontribusi aktif dalam menjaga keberlangsungan negara hukum. Serta peran media massa juga turut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi, media massa dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, adanya edukasi hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat juga turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat terus meningkat dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses penegakan hukum juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, namun juga turut berperan dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Melalui kolaborasi antara pemerintah, media massa, dan lembaga hukum lainnya, diharapkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju dalam hal penegakan hukum dan keadilan.

Studi Kasus Negara Hukum yang Telah Sukses. Negara hukum yang telah berhasil menerapkan prinsip keadilan masih merupakan tantangan dalam penegakan prinsip-prinsip negara hukum. Pelaksanaan dan penerapan norma hukum yang tidak konsisten serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Sebagai contoh, Jerman dikenal sebagai negara hukum yang sukses dalam menerapkan prinsip keadilan melalui sistem peradilan yang transparan dan efisien. Berkat konsistensi dalam penerapan norma hukum, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum di Jerman sangat tinggi. Sebagai contoh, di Jerman, sistem peradilan yang transparan dan efisien telah memastikan konsistensi dalam penerapan norma hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum sangat tinggi. Namun, di negara lain seperti Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum masih rendah karena adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang jarang diadili dengan tegas dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan prinsip keadilan tidak hanya bergantung pada sistem peradilan yang baik, tetapi juga pada ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, meskipun sistem peradilan mereka dianggap konsisten dan transparan, kasus-kasus kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam yang seringkali tidak ditindaklanjuti dengan tegas telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum tidak hanya

bergantung pada konsistensi dalam penerapan norma hukum, tetapi juga pada perlakuan yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengedepankan konsistensi dalam menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa semua kasus pelanggaran hukum ditindaklanjuti dengan tegas tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara ini masyarakat dapat mempercayai sistem hukum dan aparat penegak hukum sehingga tercipta keadilan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum dapat terjaga dan diperkuat, sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum dan adil.

Pelajaran yang dapat dipetik untuk diterapkan di Indonesia. Pelajaran yang dapat di petik untuk diterapkan di Indonesia dari Finlandia adalah penyederhanaan materi dan mata pelajaran untuk mengurangi beban belajar anak SD, mengurangi jam mengajar guru di kelas, serta memperoleh pendidikan pengembangan profesi untuk guru. Selain itu, biaya sekolah yang 100% didanai pemerintah juga dapat menjadi pelajaran yang di petik. Finlandia juga memberikan pelajaran terkait usia masuk sekolah dasar, sistem penilaian pembelajaran, kesetaraan hak anak dalam kualitas pengajaran, rasio antara guru dan siswa, jumlah jam istirahat, kualitas guru, kurikulum, dan gaji guru sebagai pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, implementasi kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa juga menjadi salah satu pelajaran yang dapat diambil dari Finlandia. Dengan adanya pendidikan pengembangan profesi untuk guru, diharapkan kualitas pengajaran di Indonesia juga dapat meningkat. Selain itu, rasio antara guru dan siswa yang lebih kecil dapat membantu dalam meningkatkan interaksi dan pemahaman antara guru dan siswa. Semua hal ini merupakan langkah-langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, sistem pendidikan di Finlandia juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, sehingga menghasilkan individu yang lebih berkembang secara holistik. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa.

Strategi yang digunakan Negara tersebut dalam mencapai keadilan dalam sistem hukumnya. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengembangkan berbagai model untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem peradilan mereka. Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern adalah perbedaan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di banyak negara. Syariah memiliki dasar teologis dan moral yang kuat, sementara hukum positif sering kali lebih pragmatis dan sekuler. Memadukan kedua sistem ini membutuhkan pendekatan yang cermat agar tidak mengurangi esensi dari masing-masing sistem. Dalam beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan keuangan berdasarkan syariah. Namun, tantangan muncul ketika terjadi konflik antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku secara umum di negara tersebut. Upaya untuk menyelaraskan kedua sistem hukum ini sering kali memerlukan interpretasi yang hati-hati dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing sistem. Pada kenyataannya, proses integrasi antara hukum Islam dan hukum positif sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukum Islam harus menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan, sementara yang lain berargumen bahwa hukum positif yang berlaku secara umum harus tetap menjadi acuan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Di tengah kompleksitas perbedaan

pandangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk mencari solusi yang adil dan seimbang guna menjamin perlindungan hak-hak semua individu tanpa diskriminasi. Selain itu, dialog antara berbagai pihak yang terlibat juga perlu ditingkatkan agar upaya integrasi hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Dengan demikian, penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dapat diwujudkan tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku secara umum. Keberagaman pandangan dan hukum harus dipandang sebagai kekayaan yang dapat memperkaya sistem hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu. Dengan terus meningkatkan dialog dan kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat tercapai untuk menciptakan peradilan yang lebih efektif dan berpihak pada keadilan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu tanpa terkecuali. Keberagaman pandangan dan hukum juga akan menjadi modal bagi terciptanya keadilan yang lebih merata dalam masyarakat. Dengan terus meningkatkan dialog dan kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum positif akan semakin kuat dan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan berlandaskan pada keadilan yang sejati.

D. Penutup

Perlu adanya upaya yang terus menerus untuk memperkuat implementasi hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman pandangan dan hukum, serta memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum positif, diharapkan negara hukum yang ideal dapat terwujud. Semua pihak harus berperan aktif dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif dan berlandaskan pada keadilan yang sejati, sehingga perlindungan yang adil dapat dirasakan oleh semua individu tanpa terkecuali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang kuat dan transparan merupakan fondasi yang penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan reformasi dan peningkatan dalam bidang hukum tidak dapat diabaikan. Hanya dengan adanya kepastian hukum yang jelas, para pelaku usaha dan investor asing akan merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sistem hukum yang kuat juga dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin keadilan bagi semua warga negara, serta memberikan kepastian dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, korupsi dapat ditekan, investasi dapat meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum di Indonesia agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum yang menyeluruh, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pembentukan lembaga independen yang dapat mengawasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam proses hukum dan pengadilan yang berintegritas. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

Alim, Saparuddin Harahap, Tsaqifa Az-Zahra Maulida, Ibrahim Muhamad, and Amalia Zahra. "Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam Annisa (2023) EcoIqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah 5 no. (18).

- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum (2018) Kertha Wicaksana 12 no. (2).
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia (2017) MasalahMasalah Hukum 46 no. (4).
- Djafar, Zaitun Shintia. "Politik hukum menciptakan lembaga Peradilan yang independen wibawa Dan akuntabel (2016) Lex Privatum 4 no. (5).
- Fridawati, Titit Muhammad Isan Iswandi Abdinur Fauzan Sugawa Muhammad Rafi W. N. Zubaidah Abdul Aziz et al. "Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern (2024) Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 19 no. (1).
- Haryanto, Bambang. "Sistem Pendidikan Di Finlandia Sebagai Pelajaran Yang Di Petik (Lesson Learnt) Untuk Pendidikan Indonesia (2024) Insan Cendekia Jurnal Studi Islam Sosial dan Pendidikan 3 no. (15)
- Keysha, Riandani, Putri Azzahra Nazwa, Febriyani Suci, and Putri Yani. "Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan dan Progres dalam Mewujudkan Keadilan Triya (2024) Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan dan Progres dalam Mewujudkan Keadilan. (2).
- Nuriah, Sari, Dea Avita Florista, and Julia Vindi Putri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional Henderina (2024) Indonesian Journal of Law 9 no. (1).
- Puri, Widhiana Hestining. "Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia." Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol (20177) 3 No. (1)
- Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat (2011) Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 5 no. (2).
- Riski, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan (2023) Mandalika Law Journal 10 no. (1).
- Syamsuddin, Rohana (2021) Buku keterampilan berbahasa indonesia. (Universitas Negeri Makassar 59)
- Ulil, Ahmadulil Ulil. "Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional (2079) Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 8 no. (1).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia (20144) Jurnal Wawasan Yuridika 30 no. (1)